

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH 2015

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH 2015**

<http://sulteng.bps.go.id>



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH 2015

Katalog : 4102004.72  
ISBN : 978-602-1385-37-1  
No. Publikasi : **72550.1605**  
Ukuran Buku : **18 x 25 cm**  
Jumlah Halaman : **xii + 53 halaman**

Naskah :  
**Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

Gambar Kulit :  
**Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik**

Diterbitkan Oleh :  
**©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah**

Dicetak Oleh :  
**Percetakan Rio Palu**

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.*

# TIM PENYUSUN

Pengarah : Ir. Faizal Anwar, MT  
Editor : Sukadana Sufii, SSi, ME  
Penyusun : I Ketut Dibia

<http://sulteng.bps.go.id>



# KATA PENGANTAR

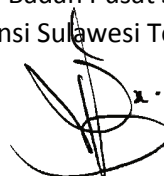
Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan masyarakat karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2015.

Publikasi ini akan menjadi produk tahunan BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang menyajikan data kondisi kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2015.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Palu, Juli 2016

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah,



**Faizal Anwar**



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
1. KEPENDUDUKAN .....	1
1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin .....	1
1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	3
1.3. Angka Beban Ketergantungan .....	5
1.4. Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama .....	8
1.5. Penggunaan Alat/Cara KB .....	10
2. KESEHATAN DAN GIZI .....	13
2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	13
2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita .....	14
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan .....	16
3. PENDIDIKAN .....	21
3.1. Angka Melek Huruf (AMH) .....	21
3.2. Rata-rata Lama Sekolah .....	23
3.3. Tingkat Pendidikan .....	25
3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM) .....	27
4. KETENAGAKERJAAN .....	29
4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	29
4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan .....	31
4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan .....	32
4.4. Jumlah jam Kerja .....	34
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI .....	35
5.1. Pengeluaran Rumah Tangga .....	35



5.2. Konsumsi Kalori dan Protein.....	37
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN .....	39
6.1. Kualitas Rumah Tinggal .....	39
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal .....	41
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	43
7. KEMISKINAN .....	45
7.1 Perkembangan Kemiskinan .....	45
7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan. Kemiskinan (P2) .....	47
8. SOSIAL LAINNYA.....	49
8.1. Perjalanan Wisata8.2. Akses pada Teknologi, Informasi dan Komunikasi .....	49
8.2. Akses pada Teknologi, Informasi dan Komunikasi .....	51
8.3. Kredit Usaha.....	52
8.4. Tindak Kejahatan .....	53

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah .....	2
Tabel 1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2015 .....	5
Tabel 1.3	Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen),2014 – 2015 .....	11
Tabel 2.1	Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Wilayah (persen), 2015 .....	19
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kabupaten/Kota, 2015.....	22
Tabel 3.2	Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah, 2015 .....	25
Tabel 3.3	Penduduk 10 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2015 .....	26
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2015 .....	27
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan,Tahun 2015 .....	28
Tabel 3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan,Tahun 2015 .....	28
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 – 2015.....	30
Tabel 4.2.	Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015 .....	32
Tabel 4.3	Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja (Ribuan), Tahun 2014 – 2015 .....	34
Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2015 .....	36
Tabel 6.1	Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2015 .....	40

Tabel 6.2. Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2015 .....	42
Tabel 7.1. Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Tengah, 2014 – 2015 .....	47
Tabel 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015 .....	50

<http://sulteng.bps.go.id>

# Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Komposisi Luas Kota dan Luas Kabupaten di Sulawesi Tengah, 2015 .....	4
Gambar 1.2	Komposisi Penduduk Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Umur, Tahun 2010-2015 .....	6
Gambar 1.3.	Angka Beban Ketergantungan, 2010-2015 .....	7
Gambar 1.4.	Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota, 2015 .....	8
Gambar 1.5.	Wanita yang Kawin sebelum Mencapai Usia 21 tahun menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015 .....	9
Gambar 2.1	Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah, 2015 .....	14
Gambar 2.2	Anak Usia kurang dari 2 Tahun yang masih Diberi ASI (persen), 2015 .....	15
Gambar 2.4.	Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2015 ....	15
Gambar 2.3	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2015 .....	16
Gambar 2.5.	Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Sulawesi Tengah (persen), 2015 .....	17
Gambar 3.1.	Harapan Lama Sekolah, 2010-2015 .....	23
Gambar 4.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015 .....	30
Gambar 4.2.	Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015 .....	33
Gambar 5.1.	Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2015 .....	36
Gambar 5.2.	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sulawesi Tengah, 2015 .....	38
Gambar 6.1.	Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota (persen), 2015 .....	43
Gambar 7.1.	Persentase Penduduk Miskin, 2012 – 2015 .....	46

Gambar 8.1. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP (persen), 2015 .....	51
Gambar 8.2. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2015 .....	52

<http://sulteng.bps.go.id>

# 1. KEPENDUDUKAN

Pembahasan tentang kependudukan antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan dengan peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar yakni: pangan, sandang, papan, dan pendidikan, kesehatan yang layak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Seperti diketahui bersama bahwa hampir semua rencana program pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, penyebaran dan komposisi menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan tujuan program yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

## 1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada daerah yang belum maju dapat menimbulkan permasalahan. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Saat ini penduduk Sulawesi Tengah menempati peringkat empat dalam hal jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035, jumlah penduduk Sulawesi Tengah sebanyak 2,88 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 8,52 juta jiwa. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebanyak 45,4 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Tengah meningkat sebanyak 230,68 ribu jiwa, sekitar 8,02 persen.

Sama halnya dengan provinsi lain, penduduk Sulawesi Tengah cenderung memilih berdomisili di wilayah kota. Pesona wilayah kota tidak dapat dikalahkan oleh wilayah kabupaten. Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk paling banyak di Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 457,71 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Banggai Laut, yaitu 69,51 ribu jiwa.

Semenjak tahun 2010 hingga 2015, secara absolut, jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami perlambatan dan dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tengah sudah dibawah 2 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain namun sedikit di atas rata-rata nasional. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana dimana program ini ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah, 2010-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)'	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	2.646.010		1,05
2011	2.692.819	1,77	1,05
2012	2.739.317	1,73	1,05
2013	2.785.488	1,69	1,05
2014	2.831.283	1,64	1,05
2015	2.876.689	1,60	1,04

Sumber : Proyeksi Penduduk

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling kecil diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Laju pertumbuhan Banggai Kepulauan adalah 0,93 persen, lebih dari separuh angka provinsi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi berada di Morowali Utara, sebesar 2,38 persen, jauh di atas laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tengah. Kota Palu yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,72 persen.

Berdasarkan laju pertumbuhan di atas, ada range sebesar 1,45 persen. Hal itu mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Sulawesi

Tengah tidaklah homogen. Dengan adanya disparitas tersebut, dimungkinkan adanya disparitas kebijakan kependudukan di Sulawesi Tengah.

Laju pertumbuhan penduduk yang besar tidak serta-merta menjadikan jumlah penduduk yang besar pula. Sebagai contoh, laju pertumbuhan Kota Palu atau Parigi Moutong relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten lain, tetapi jika dilihat angka absolutnya, Kota Palu dan Parigi Moutong bertambah lebih banyak dari Kabupaten lainnya. Secara absolut hampir sama. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Kota Palu dan Parigi Moutong yang memang sudah besar.

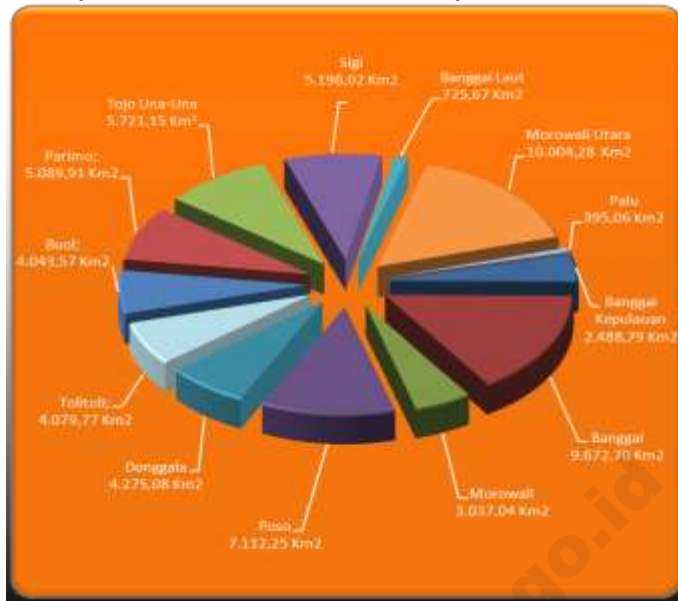
Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, di Sulawesi Tengah sex ratio dicatat sebesar 104,51. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 104-105 penduduk laki-laki. Dapat juga dikatakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kabupaten dengan sex ratio tertinggi adalah Morowali Utara, yaitu 109,45. Ada yang unik jika melihat sex ratio menurut Kabupaten/Kota. Terlihat tidak ada satupun kabupaten/kota yang jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki di Sulawesi Tengah (sex ratio-nya di bawah 100). Hal itu menandakan bahwa di semua wilayah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuannya.

## **1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Salah satu persoalan yang dihadapi terkait penduduk adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan dengan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, serta tidak memadainya akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta masalah sosial lainnya.



**Gambar 1.1. Komposisi Luas Kota dan Luas Kabupaten di Sulawesi Tengah, 2015**



Persebaran penduduk antara kabupaten dan kota tampak masih timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau

Kepadatan penduduk di Sulawesi Tengah sebesar 47, yang berarti terdapat 47 jiwa di setiap km<sup>2</sup>. Tercatat Kota Palu memiliki penduduk terpadat, dimana setiap km<sup>2</sup> dihuni sekitar 932 jiwa. Terpadat kedua adalah Banggai Laut, yaitu setiap km<sup>2</sup> dihuni sekitar 96 jiwa dan berikutnya Parigi Moutong dengan kepadatan 90 jiwa. Sementara daerah yang paling jarang penduduknya adalah Morowali Utara dan Tojo Una-una, dimana di kedua kabupaten tersebut setiap km<sup>2</sup> wilayahnya masing-masing dihuni oleh 12 dan 26 orang.

**Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2015**

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	2 488,79	114.980	46
2. Banggai	9 672,70	354.402	37
3. Morowali	3 037,04	113.132	37
4. Poso	7 112,25	235.567	33
5. Donggala	4 275,08	293.742	69
6. Tolitoli	4 079,77	225.875	55
7. Buol	4 043,57	149.004	37
8. Parigi Moutong	5 089,91	457.707	90
9. Tojo Una-Una	5 721,15	147.536	26
10. Sigi	5 196,02	229.474	44
11. Banggai Laut	725,67	69.514	96
12. Morowali Utara	10 004,28	117.670	12
13. Palu	395,06	368.086	932
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>61 841,29</b>	<b>2.876.689</b>	<b>47</b>

Sumber: Sulawesi Tengah dalam Angka 2016

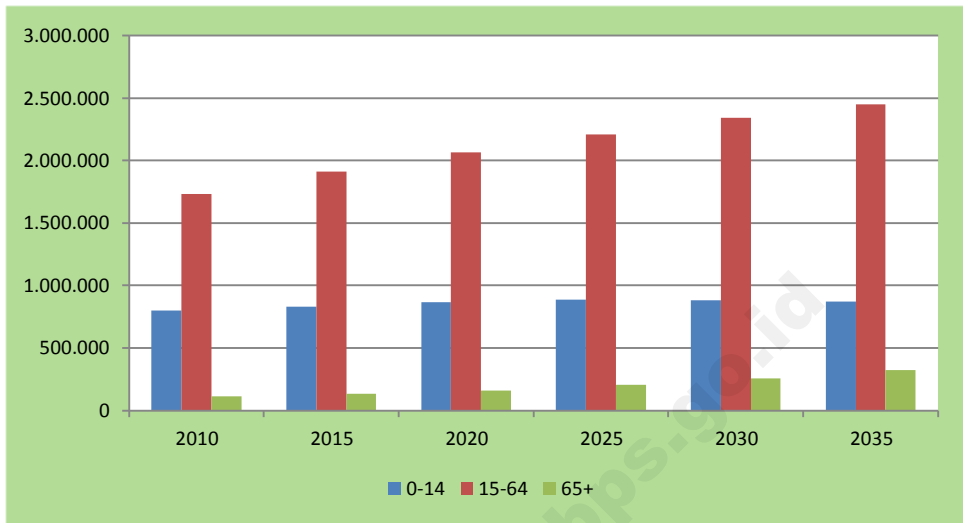
### 1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus di tanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif.

Gambar 1.3 menunjukkan komposisi penduduk Sulawesi Tengah menurut tiga kelompok umur yakni kelompok umur produktif (15-64 tahun), kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Sulawesi Tengah memiliki penduduk usia muda sekitar 25,81 persen, penduduk usia produktif 68,23 persen, dan penduduk usia lanjut 5,95 persen. Selama periode 2010-2015 telah terjadi peningkatan komposisi penduduk usia lanjut, dan dikenal dengan istilah proses penuaan (*aging process*) atau proses transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua, dan selama periode 2010-2015

terjadi penurunan jumlah penduduk usia muda serta penambahan proporsi penduduk usia produktif.

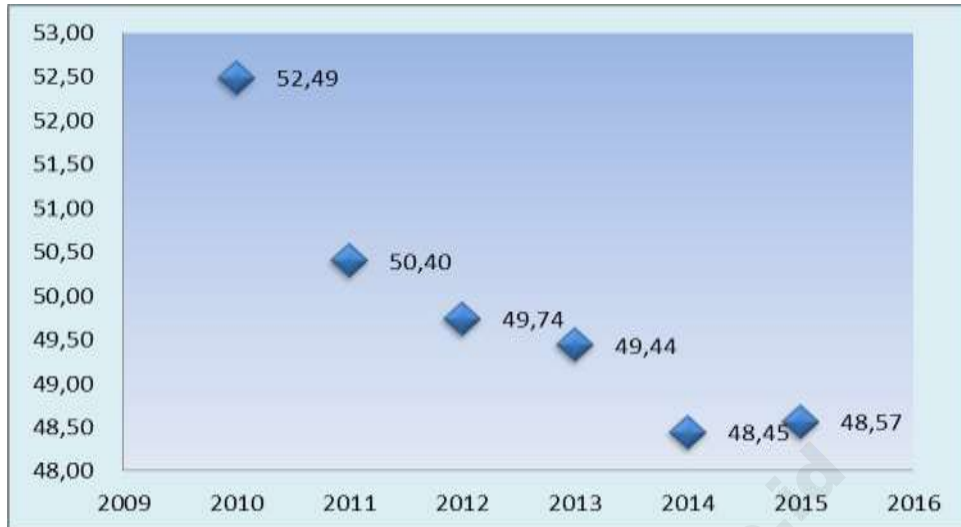
**Gambar 1.2 Komposisi Penduduk Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Umur, Tahun 2010-2015**



Sumber : Proyeksi Penduduk

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari angka beban ketergantungan yang semakin mengecil. Pada tahun 2015 angka beban ketergantungan sebesar 46,56, berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 sampai 47 penduduk usia tidak produktif, menurun jika dibandingkan tahun 2014. Hal ini dapat menjadi sinyal yang baik untuk pemerintah setempat memaksimalkan penduduk usia kerja. Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi human capital maupun saving.

**Gambar 1.3. Angka Beban Ketergantungan, 2010-2015**

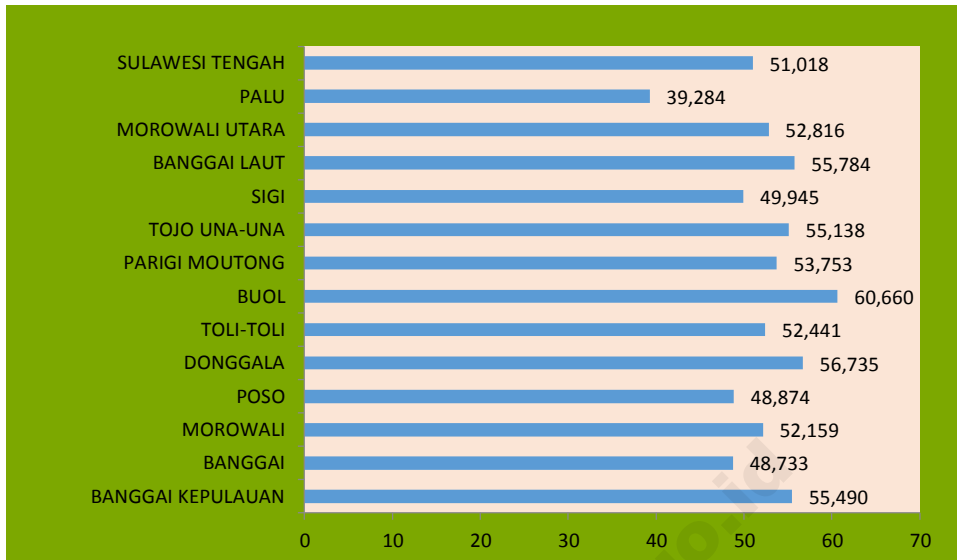


Sumber : Susenas

Tren angka beban ketergantungan 2010-2015 Sulawesi Tengah terlihat ke arah penurunan dari 52,49 di tahun 2010 menjadi 48,57 di tahun 2015. Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*).

Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi sumber daya manusia (*human capital*) yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi human capital misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

**Gambar 1.4. Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota, 2015**



Sumber: Susenas 2015

Bila diamati berdasarkan kabupaten/kota, tampak hanya empat kabupaten yang angka beban ketergantungannya berada di bawah 50. Kabupaten tersebut adalah Kota Palu (39,28), Banggai (48,73), Poso (48,87), dan Sigi (49,94). Angka beban ketergantungan tertinggi di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Buol, sedangkan yang terendah adalah Kota Palu, yaitu 39,28.

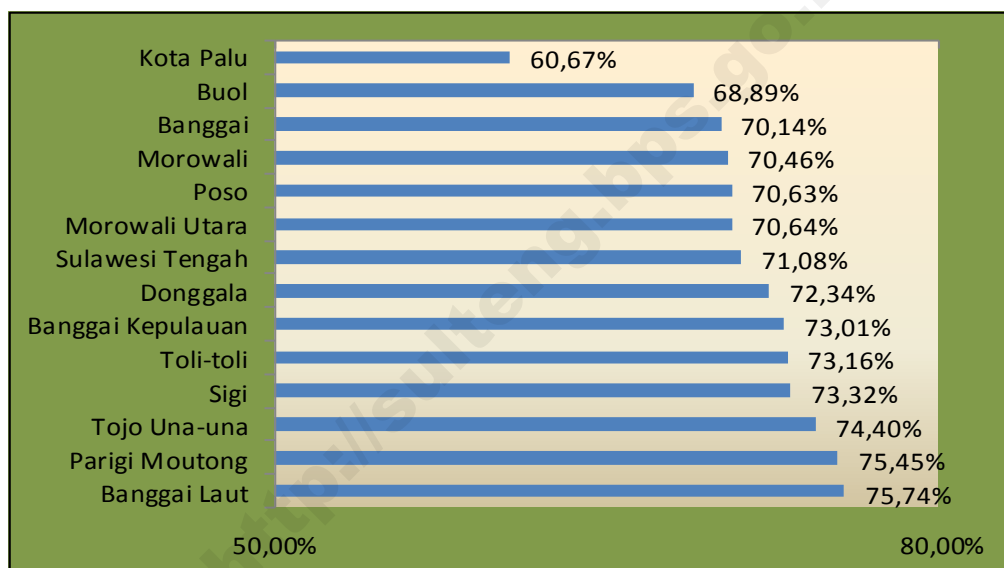
#### **1.4. Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama**

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perpindahan atau migrasi dibagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Hasil Susenas menunjukkan terdapat sekitar 35,5 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang menikah pada usia di bawah 21 tahun di Sulawesi Tengah tahun 2015. Perkawinan di bawah 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental, sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah

**Gambar 1.5. Wanita yang Kawin sebelum Mencapai Usia 21 tahun menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015**



Sumber: Susenas 2015

Pada tahun 2015, hampir 76 persen wanita berumur 10 tahun ke atas yang sudah kawin di Kabupaten Banggai Laut mengaku menikah sebelum mencapai usia 21 tahun. Angka itu menunjukkan persentase paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Tengah. Jika dilihat lebih detail ke kelompok umur kurang dari 21 tahun, masih ada sekitar 6 persen wanita pernah kawin di Sulawesi Tengah yang menikah atau kawin pada umur belum mencapai 16 tahun. Sementara itu pernikahan dini paling banyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong, dimana terdapat 13 wanita dari 100 wanita yang pernah kawin di Parigi Moutong menikah di usia 16 tahun atau bahkan sebelumnya. Dibanding kabupaten/kota lainnya, jumlah ini

merupakan yang terbanyak. Cukup kontras bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Buol, hanya 7 diantara 100 wanita saja yang menikah di rentang usia tersebut.

### **1.5. Penggunaan Alat/Cara KB**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang berbagai jenis macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pemerintah yang menangani program KB ini. BKKBN mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2015 hampir mencapai 67 persen. Sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 68 persen, namun tidak signifikan.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

**Tabel 1.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2015**

Kabupaten/Kota	MOW/ Tubek- tomi	MOP/ Vasek- tomi	AKDR/ IUD	Suntikan	Susuk KB	Pil KB	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Banggai Kepulauan	0,01	0,00	0,68	45,4	2,63	49,36	1,92	100,00
02. Banggai	0,34	0,25	5,71	49,94	6,43	36,35	0,98	100,00
03. Morowali	3,54	0,00	4,64	56,48	5,72	28,27	1,35	100,00
04. P o s o	4,85	0,00	10,09	38,96	10,9	34,11	1,09	100,00
05. Donggala	1,25	0,00	1,41	49,99	5,19	37,66	4,50	100,00
06. Tolitoli	0,00	0,00	2,8	47,98	10,81	37,01	1,40	100,00
07. B u o l	0,00	0,08	2,7	51,85	4,21	40,72	0,44	100,00
08. Parigi Moutong	0,42	0,00	3,87	56,63	3,54	34,39	1,15	100,00
09. Tojo Una-una	1,56	0,00	3,75	57,11	9,56	25,43	2,59	100,00
10. Sigi	2,72	0,25	5,62	37,92	12,71	38,36	2,42	100,00
11. Banggai laut	0,00	0,00	0,00	32,52	4,06	63,42	0,00	100,00
11. Morowali Utara	1,51	0,00	2,5	52,67	14,1	25,68	3,54	100,00
71. Kota Palu	4,65	0,00	10,48	37,91	6,21	32,81	7,94	100,00
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>1,59</b>	<b>0,06</b>	<b>4,76</b>	<b>48,20</b>	<b>7,09</b>	<b>35,99</b>	<b>2,31</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) ditemukan bahwa pada tahun 2015, suntikan dan pil merupakan dua alat kontrasepsi yang paling diminati oleh wanita umur 15-49 tahun yang pernah kawin. Kondisi ini masih sama dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2015, empat puluh tujuh persen dari mereka adalah pengguna alat KB suntik, sementara 26 persen adalah pemakai pil KB. Di sisi lain, terdapat 6 orang pasangan dari 1000 wanita di rentang usia tersebut yang masih menggunakan KB cara vasektomi, dan dapat dikatakan cara KB inilah yang paling tidak populer.





## 2. KESEHATAN DAN GIZI

Aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

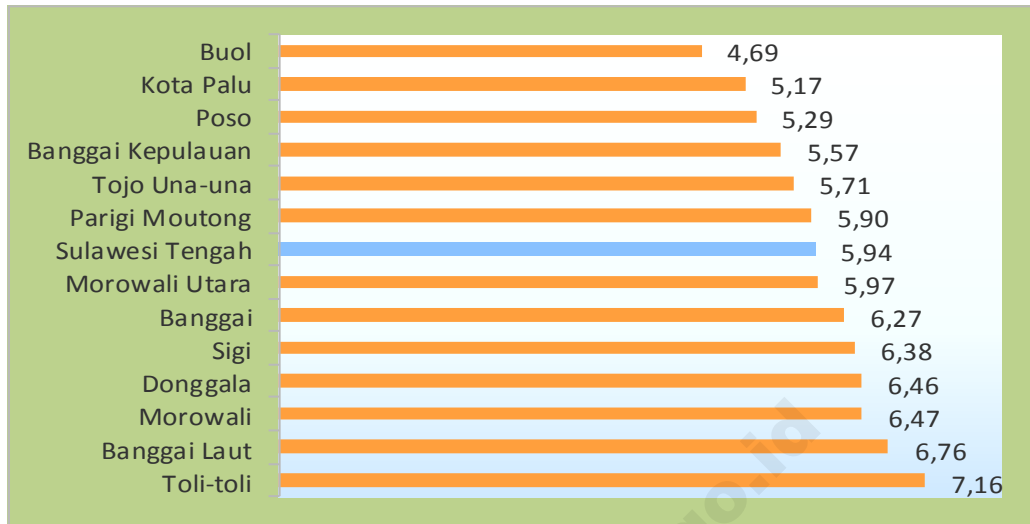
### 2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalah morbiditas atau angka kesakitan penduduk dan rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Semakin kecil angka morbiditas dan rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Merujuk pada konsep Badan Pusat Statistik, morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya.

Pada tahun 2015, angka kesakitan (morbiditas) di Sulawesi Tengah mencapai 29,21 persen. Hal ini berarti sekitar 29 hingga 30 dari 100 orang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah yang mempunyai angka kesakitan tertinggi di Sulawesi Tengah pada tahun 2015, yaitu hampir mencapai 37 persen. Tingkat morbiditas terendah ada di Kabupaten Sigi dan Morowali yaitu di bawah 25 persen, masing-masing sebesar 22,07 dan 24,01 persen.

Rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya tahun 2015, yaitu dari 5,94 hari. Bila dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Buol memiliki rata-rata lama sakit terpendek yaitu 4,69 hari. Kabupaten Toli-toli memiliki rata-rata lama sakit terpanjang yaitu 7,16.

**Gambar 2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah, 2015**

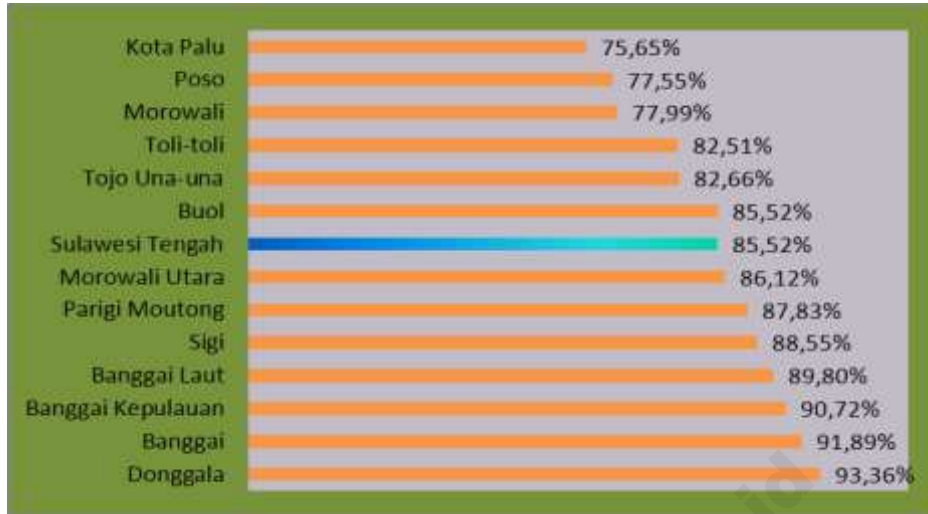


Sumber: Susenas 2015

## 2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Setelah sang anak lahir, Air Susu Ibu (ASI) dianjurkan supaya diberikan hingga anak berusia 2 tahun. ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Semakin lama bayi mendapatkan ASI, kekebalan/proteksi tubuh bayi akan lebih kuat. Pemerintah mencanangkan pemberian ASI eksklusif untuk anak hingga 6 bulan, setelah itu anak diberikan makanan pendamping ASI dan terus diberi ASI hingga usia 2 tahun. Di tahun 2015, ada sekitar 85 persen anak usia kurang dari 2 tahun di Sulawesi Tengah yang masih diberi ASI oleh ibunya. Hal ini berarti ada sekitar 15 persen anak yang sudah putus ASI sebelum mencapai usia 2 tahun. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, tampak bahwa persentase anak yang putus ASI paling tinggi berada di Kota Palu, sekitar 24 persen. Wilayah kedua tertinggi anak yang putus ASI sebelum mencapai usia 2 tahun adalah di Kabupaten Poso dan Morowali.

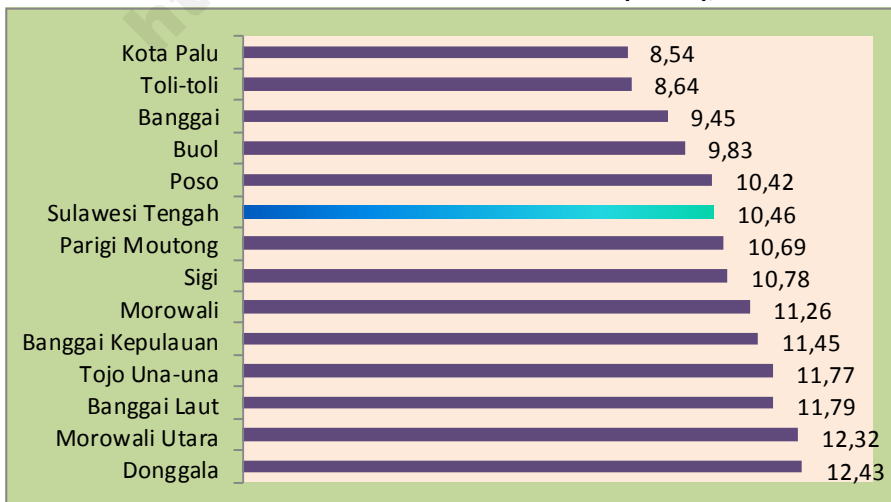
**Gambar 2.2 Anak Usia kurang dari 2 Tahun yang masih Diberi ASI (persen), 2015**



Sumber: Susenas 2015

Penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun dapat terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesadaran ibu untuk memberikan ASI juga sangat diperlukan demi generasi yang tahan terhadap penyakit kedepannya. Tentu saja dukungan seorang ayah juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan persentase anak yang mengkonsumsi ASI hingga usia 2 tahun. Gambar 2.3 menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi Tengah rata-rata seorang anak disusui oleh ibunya lebih dari 10 bulan. Dipandang dari sisi lainnya, diasumsikan konsep pemberian ASI 6 bulan pertama sudah terlampaui. Di seluruh kabupaten/kota pun kondisinya serupa, bahkan di Donggala dan Morowali Utara mencapai lebih dari setahun yaitu hingga 12,43 bulan di Donggala dan 12,32 bulan di Morowali Utara. Sisi kurangnya, rata-rata lama menyusui masih jauh dari standar maksimal, yaitu 24 bulan.

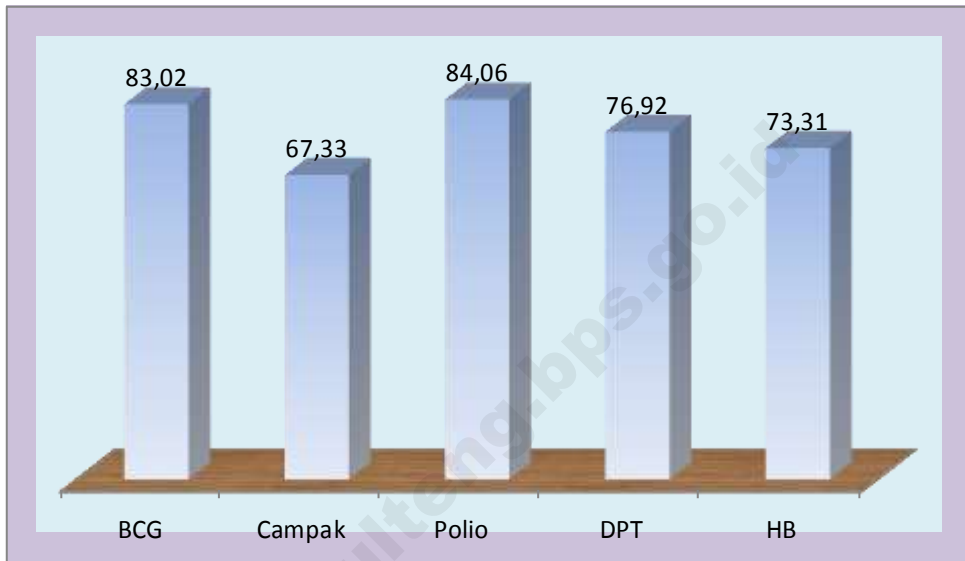
**Gambar 2.3 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2015**



Sumber: Susenas 2015

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

**Gambar 2.4. Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2015**



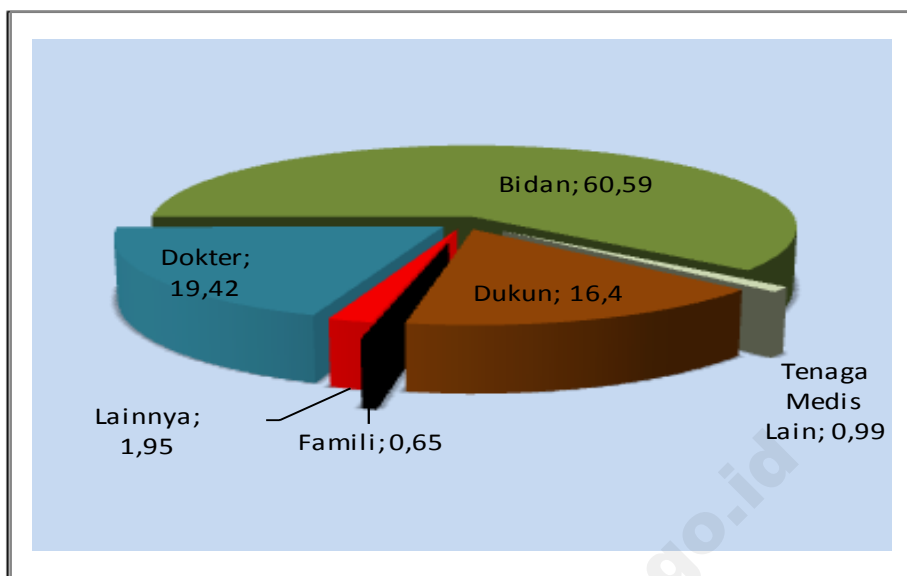
Sumber: Susenas

Balita yang pernah mendapatkan imunisasi di Sulawesi Tengah masih tergolong relatif rendah, angkanya kurang dari 85 persen. Bahkan untuk imunisasi campak baru mencapai 67,33 persen. Balita yang mendapatkan imunisasi BCG dan Polio sudah lebih dari 80 persen. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak paling rendah berada di Kabupaten Tolitoli (53,28 persen) dan yang paling tinggi adalah Kabupaten Poso dengan capaian 78,54 persen.

### **2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan**

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

**Gambar 2.5. Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Sulawesi Tengah (persen), 2015**



Sumber: Susenas

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Sulawesi Tengah umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Sembilan puluh persen bayi yang lahir di tahun 2015 ditolong oleh tenaga kesehatan/medis. Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Dari beberapa pilihan tenaga medis, enam puluh persen masyarakat lebih memilih ditolong oleh bidan pada saat persalinan. Selain karena bidan merupakan tenaga yang dilatih khusus untuk menolong persalinan, bidan juga mudah dijangkau sejak adanya program bidan desa. Di perkotaan pun bidan mudah dijangkau karena di setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan.

Di sisi lain, masih ada 16,4 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun bayi. Gambaran ini lebih umum terjadi di wilayah pedesaan. Manakala bidan sulit didapat maka dukun menjadi pilihan lain, terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Dengan kondisi demikian mau tidak mau eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga tetap diperlukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi mengingat eksistensi mereka tadi.

Selain bidan, preferensi masyarakat Sulawesi Tengah untuk memilih dokter dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 19,42 persen. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter dibanding tenaga medis lain apalagi dukun bayi. Kemudahan mendapatkan pelayanan dokter di perkotaan menjadikan masyarakat cenderung memilih dokter. Bidan biasanya tersedia di rumah bersalin dan puskesmas. Rumah sakit yang ditangani oleh dokter biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan proses persalinan.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota maka terdapat dua daerah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat, yaitu Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Daerah-daerah tersebut memerlukan perhatian yang cukup serius terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di dua daerah tersebut, penolong persalinan oleh tenaga non-kesehatan masih sangat tinggi. Sekitar hampir 55 dari 100 wanita bersalin di Banggai Laut lebih memilih ditolong oleh tenaga non-kesehatan. Demikian halnya di Banggai Kepulauan, sekitar 51 dari 100 wanita bersalin lebih memilih ditolong oleh tenaga non-kesehatan. Di wilayah (Palu, Banggai, Morowali, Tojo Una-una), sudah banyak yang menggunakan jasa dokter, mencapai lebih dari 20 persen. Hal itu disebabkan oleh mudahnya akses ke dokter.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dan penduduk di perkotaan ini dapat disebabkan oleh ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas kesehatan tersebut, ditambah perilaku penduduk itu sendiri.

**Tabel 2.1 Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Wilayah (persen), 2015**

Tempat Berobat	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	17,11	7,05	9,42
Rumah Sakit Swasta	3,02	0,56	1,14
Praktek Dokter/Bidan	31,58	30,29	30,59
Klinik/Praktek Dokter	4,93	4,62	4,69
Puskesmas/Pustu	41,39	43,03	42,64
UKBM *)	2,90	15,56	12,57
Praktek Pengobatan tradisional/ alternatif	4,06	2,78	2,89

Sumber: Susenas

\*) terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2015 adalah penduduk yang berobat ke Puskesmas (42,64 persen) dan praktek dokter/bidan (30,59 persen). Preferensi masyarakat daerah perkotaan pun berbeda dengan masyarakat perdesaan. Penduduk perkotaan yang berobat jalan ke rumah sakit jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Tujuh belas persen lebih penduduk perkotaan memilih berobat jalan ke rumah sakit, sementara di pedesaan hanya kurang dari sepuluh persen. Selain itu, sekitar empat puluh tiga persen penduduk pedesaan lebih memilih berobat jalan ke praktek dokter/bidan, sementara di perkotaan hanya sekitar empat puluh satu persen.





## 3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan dalam bab ini adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka

Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015 yang dilakukan oleh BPS.

### 3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu

persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya di Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sudah mencapai 99,63 persen, sisanya sebanyak 0,39 persen adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) Sulawesi Tengah sudah sangat tinggi. Tidak hanya di Sulawesi Tengah, banyak provinsi lain di Indonesia yang juga sudah mencapai AMH yang cukup tinggi. Hanya ada dua provinsi yang di bawah 90 persen, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua. Di Provinsi Papua, AMH masih tergolong cukup rendah, kurang dari 71 persen. Dengan sudah tingginya AMH di sebagian besar wilayah Indonesia, maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, AMH tidak lagi menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lagi. AMH diganti dengan indikator *Expected Years of Schooling* (EYS) atau Harapan Lama Sekolah (HLS).

**Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2015**

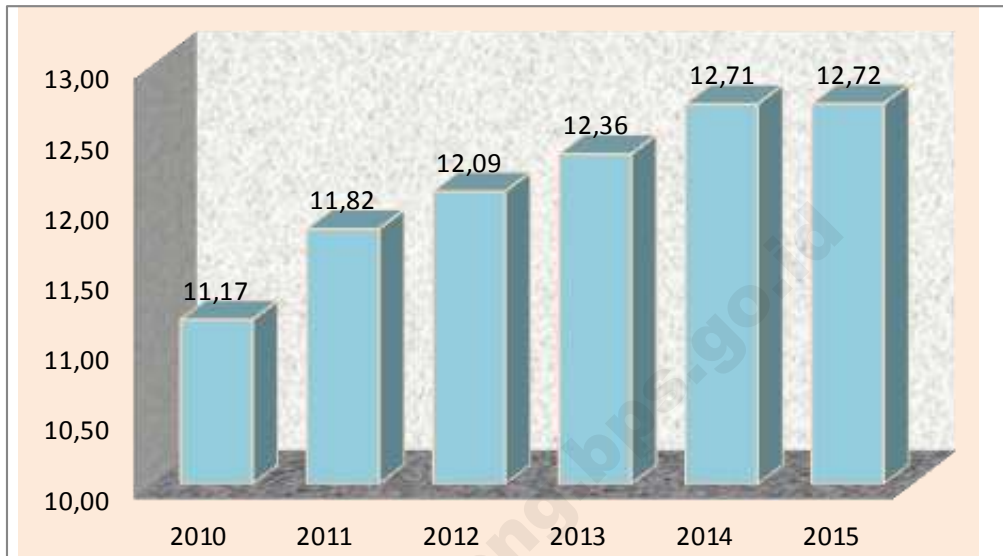
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Banggai Kepulauan	97,16	95,94	96,56
02. Banggai	97,89	95,62	96,77
03. Morowali	99,43	98,79	99,11
04. Poso	99,56	97,52	98,56
05. Donggala	97,72	95,01	96,4
06. Tolitoli	98,25	97,36	97,82
07. Buol	99,4	98,56	98,99
08. Parigi Moutong	97,25	94,91	96,1
09. Tojo Una-una	99,13	97,53	98,35
10. Sigi	97,13	96,14	96,64
11. Banggai Laut	98,81	99,01	98,91
12. Morowali Utara	98,95	96,83	97,93
71. Kota Palu	99,79	99,45	99,62
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>98,38</b>	<b>96,87</b>	<b>97,64</b>

Sumber: Susenas

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama

dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Gambar 3.1. Harapan Lama Sekolah, 2010-2015**



Sumber : Susenas 2015

Dari tahun 2010 hingga 2015 angka HLS terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,98 persen. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Rata-rata tiap orang di Sulawesi Tengah pada tahun 2015 diharapkan akan melalui pendidikannya selama lebih dari 12 tahun. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat adalah, indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan memberikan dampak yang berarti.

### 3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Tengah tahun 2015 adalah 7,89 tahun. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya 0,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Tengah baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMP .

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kota Palu merupakan wilayah di Sulawesi Tengah yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Palu sebesar 11,24 tahun, berarti penduduk Kota Palu rata-rata bersekolah hingga kelas 2 SMA. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu sebesar 6,71 tahun. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tentu kondisi masyarakatnya lebih heterogen dibandingkan daerah lain. Dengan berbagai macam daya tarik yang ada di Palu, mengundang penduduk dari wilayah lain untuk bermukim di kota ini. Masyarakat pendatang ini juga sangat mempengaruhi rata-rata lama sekolah di suatu daerah. Jika masyarakat pendatang banyak yang menamatkan pendidikan tinggi, tentunya rata-rata lama sekolah akan terdongkrak naik. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat pendatang banyak yang berpendidikan rendah, tentunya akan menekan rata-rata lama sekolah suatu wilayah.

**Tabel 3.2 Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah, 2015**

Kabupaten/Kota	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1 Banggai Kepulauan	7,39	7,73
2 Banggai	7,71	7,72
3 Morowali	7,97	8,38
4 Poso	8,49	8,52
5 Donggala	7,80	7,81
6 Tolitoli	7,69	7,72
7 Buol	8,30	8,32
8 Parigi Moutong	6,71	6,72
9 Tojo Una-Una	7,62	7,65
10 Sigi	8,11	8,13
11 Banggai Laut	7,82	7,82
12 Morowali Utara	8,14	8,15
71 Kota Palu	11,17	11,24
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>7,39</b>	<b>7,73</b>

Sumber: Susenas 2015

Morowali merupakan kabupaten yang mengalami kenaikan rata-rata lama sekolah yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah Morowali sebesar 7,97, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 8,38. Sedangkan wilayah yang paling stagnan adalah Morowali Utara. Rata-rata lama sekolah di Morowali Utara pada tahun 2015 adalah 7,82. Jika dibandingkan tahun 2014 tidak mengalami perubahan. Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 7,39 pada tahun 2014 menjadi 7,73 tahun di 2015. Kabupaten lainnya hanya mengalami kenaikan relatif kecil di bawah satu persen jika dibandingkan dengan tahun 2014.

### 3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

**Tabel 3.3 Penduduk 10 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2015**

Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	19,12	21,11	20,63
Sekolah Dasar	33,21	32,65	32,02
SLTP	18,08	17,29	17,59
Sekolah Menengah/ SMU	17,38	15,20	16,55
SMK	3,45	2,50	2,99
D1 – DII	0,73	0,77	0,73
Akademi/DIII	0,69	1,37	1,09
Universitas/DIV	5,22	5,37	5,35

Sumber: Susenas 2015

Berbagai macam cara telah dilakukan Pemerintah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Sulawesi Tengah. Gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah. Hampir setengah penduduk usia 10 tahun ke atas di Sulawesi Tengah sudah menamatkan pendidikan minimal SLTP (44,30 persen) dan sisanya adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak punya ijazah (20,63 persen) dan tamat SD (32,02 persen).

Dalam hal pendidikan terlihat bahwa telah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada statistik pendidikan yang ditamatkan. Tidak ada perbedaan nyata antara persentase perempuan yang menamatkan pendidikan tertentu dengan persentase laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama. Tipisnya perbedaan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan di Sulawesi Tengah. Budaya masa lalu dimana perempuan tidak perlu sekolah karena dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga saja sejak lama tidak tergambar di masyarakat Sulawesi Tengah. Jika ada perbedaan dalam hal persentase, dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh kemauan pribadi.

### 3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Program Wajib Belajar 9 tahun di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 13-15 tahun yang sebesar 91,80 persen. Dengan kata lain masih ada 8,20 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah atau tidak mampu bersekolah. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 7-12 tahun, APS menunjukkan angka yang baik, yaitu 98,02 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sekitar 73,80 persen, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2015**

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12	97,32	98,76	98,02
13 - 15	91,60	92,00	91,80
16 - 18	69,09	78,88	73,80

Sumber: Susenas 2015

Isu gender/kesetaraan pada indikator APS Sulawesi Tengah cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena



nantinya diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan rate of return investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Sulawesi Tengah yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki pada ke tiga jenjang pendidikan. Penelitian lebih lanjut mengenai penyebab pasti kondisi tersebut menjadi menarik bagi pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, Tahun 2015**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	108,89	105,58	107,28
SMP/SLTP	86,82	94,79	90,73
SMA/SLTA	76,35	89,88	82,87

Sumber: Susenas 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya, pada umumnya terjadi pada jenjang pendidikan SD karena adanya anak yang belum mencukupi umur tujuh tahun sudah bersekolah.

**Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, Tahun 2015**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	92,51	92,19	92,35
SMP/SLTP	69,13	73,15	71,10
SMA/SLTA	69,13	73,15	63,32

Sumber: Susenas 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2015 APM SD/Sederajat di Sulawesi Tengah sebesar 92,35 persen, artinya tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah dan atau bersekolah pada jenjang SD/ sederajat.

## 4. KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jam kerja.

### 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 – 2015**

Indikator	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK	65,56	66,76	67,51
TPT	4,19	3,68	4,10

Sumber: Sakernas

TPT Sulawesi Tengah mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan angka 4,19 persen pada tahun 2013 menjadi 4,10 pada tahun 2015. Sejalan dengan TPT, TPAK juga mengalami kenaikan, dari 65,56 persen di tahun 2013 menjadi 67,51 persen di tahun 2015. Penambahan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan bertambahnya pengangguran mengindikasikan meningkatnya lapangan kerja di Sulawesi Tengah yang dapat menarik para pengangguran masuk ke dalamnya.

Pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. TPT wilayah perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di daerah pedesaan sebesar 3,18 persen. Banyaknya jumlah dan jenis pekerjaan di wilayah perkotaan ternyata tidak mampu menampung seluruh penduduk usia kerja yang tersedia.

Jika dibandingkan dengan TPAK, kondisi di perkotaan tidak berbeda jauh dibandingkan wilayah pedesaan. TPAK wilayah perkotaan sebesar 93,40 persen dan wilayah pedesaan sebesar 96,82 persen. Hal ini berarti ada sekitar 95 hingga 96 angkatan kerja dalam 100 penduduk usia produktif di perkotaan. TPAK pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan, menyiratkan bahwa wilayah pedesaan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Angkatan kerja di pedesaan lebih banyak dibanding di perkotaan namun penganggurannya lebih rendah, merupakan sudut pandang lain yang mempertegas hal ini. Sebaliknya, fenomena yang terjadi di perkotaan, angkatan kerja lebih rendah dari wilayah pedesaan dan pengangguran tinggi. Banyak kemungkinan yang menjadi penyebab kurang diserapnya tenaga kerja. Faktor perilaku selektifnya penduduk perkotaan dalam memilih pekerjaan diduga menjadi salah satu penyebabnya.

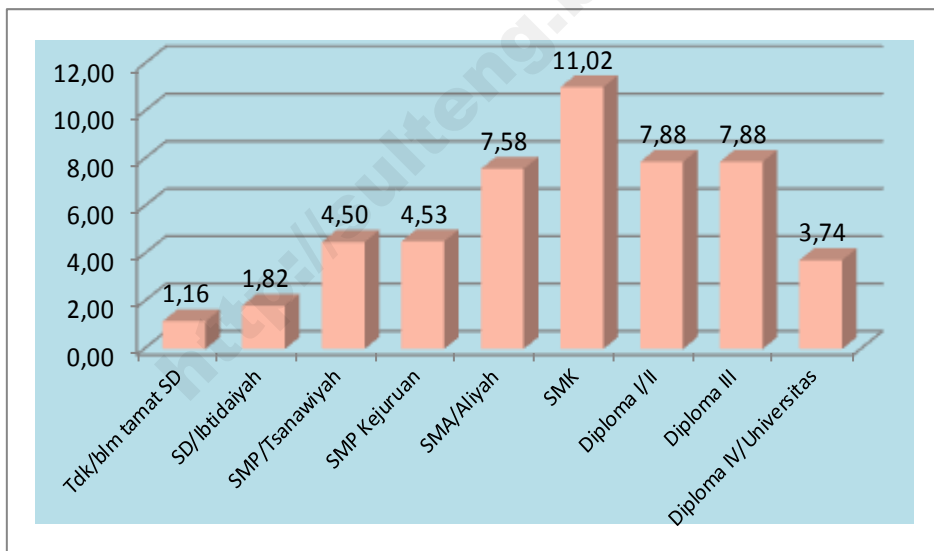
Berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2015 ada empat kabupaten/kota yang tingkat pengangguran terbukanya berada di atas tingkat pengangguran Sulawesi Tengah, yaitu Banggai (4,55 persen), Sigi (5,74 persen), Morowali Utara (5,48

persen), dan Palu (8,32 persen). Perlu perhatian khusus dari pemerintah dan pihak swasta supaya terbuka lapangan kerja yang dapat menurunkan tingkat pengangguran di empat wilayah tersebut.

#### 4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

**Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015**



Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015 penduduk Sulawesi Tengah yang menganggur adalah terbanyak berpendidikan SMK, yaitu sekitar 11,02 persen. Penganggur yang tidak tamat SD lebih kecil dibandingkan dengan penganggur yang sudah menamatkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Penganggur yang tidak menamatkan SD kurang dari 2 persen, sedangkan penganggur yang sudah menamatkan perguruan tinggi D-I dan D-II hampir mencapai 8 persen. Penganggur yang sudah tamat perguruan

tinggi inilah yang kemudian disebut dengan penganggur intelektual. Penganggur intelektual ini menempati urutan ke-2 terbanyak setelah penganggur yang tamat SMK.

Jika dilihat dari sudut pandang tipe wilayah perkotaan dan pedesaan, di kedua wilayah tersebut penganggur tamatan SMK sama-sama paling banyak. Perbedaan terlihat di peringkat persentase penganggur intelektual. Di daerah perkotaan, urutan kedua terbanyak adalah pengangguran tamatan SMP (8,67 persen), sedangkan di daerah pedesaan (8,08 persen) pengangguran SMA umum menempati persentase terbesar ke dua. Di daerah perkotaan, penganggur kebanyakan berpendidikan tamat SMA dan SMK. Sedangkan di daerah pedesaan, penganggur kebanyakan berpendidikan tamat SMA, SMK dan Diploma.

#### 4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada bahasan ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

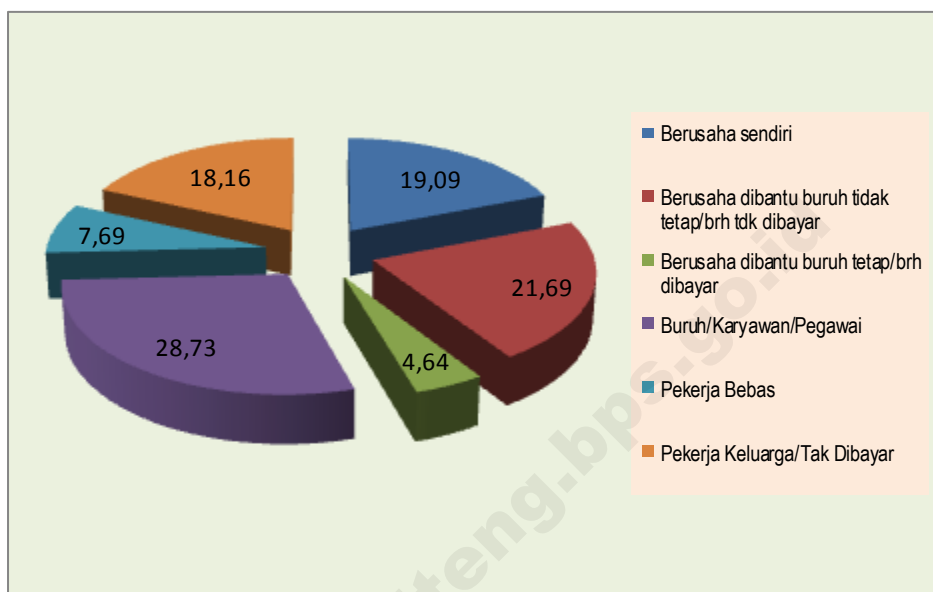
**Tabel 4.2. Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015**

Lapangan Usaha	Perkotaan	Pedesaan	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	11,20	63,97	50,03
Pertambangan dan Penggalian	1,66	1,87	1,81
Industri	5,87	3,41	4,06
Listrik, Gas dan Air Minum	0,29	0,15	0,18
Konstruksi	7,71	4,76	5,54
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	28,07	12,21	16,40
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6,38	1,90	3,08
Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	3,34	0,58	1,31
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	35,48	11,17	17,59

Sumber: Sakernas 2015

Sektor pertanian merupakan lapangan usaha favorit di Sulawesi Tengah. Sebanyak 50,03 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor industri masih belum banyak diminati oleh penduduk. Penduduk yang bekerja pada sektor jasa mendominasi wilayah perkotaan (35,48 persen), sementara di pedesaan didominasi oleh sektor pertanian (63,97 persen).

**Gambar 4.2. Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015**



Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015 penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,4 persen. Status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri (24,5 persen). Selain itu, penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas juga cukup banyak (16 persen). Pekerja bebas ini terdiri dari 2, yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas non pertanian. Pekerja bebas di pertanian lebih banyak dibandingkan dengan pekerja bebas di non pertanian, namun tidak banyak selisihnya. Lebih dari 50 persen penduduk perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai, kurang dari 50 persen sisanya adalah pengusaha, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Komposisi ini cukup berbeda dengan kondisi di pedesaan. Sekitar 25 persen penduduknya adalah pengusaha tanpa buruh/pekerja, dua puluh lima persen berikutnya berstatus buruh/karyawan/pegawai dan sisanya adalah pengusaha dengan buruh, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

#### 4.4. Jumlah jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran tidak kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan dibawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

**Tabel 4.3 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja (Ribuan), Tahun 2014 – 2015**

Jam Kerja (Jam)	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1 – 34	552,82	532,63
35 + *)	740,41	794,79
<b>Jumlah</b>	<b>1.293,23</b>	<b>132,74</b>

Sumber: Sakernas

Catatan : \*) termasuk sementara tidak bekerja

Jumlah pengangguran terselubung di Sulawesi Tengah mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja selama kurun waktu 2 tahun, jumlah pekerja dengan jam kerja normal pun juga mengalami kenaikan. Persentase penduduk perkotaan yang bekerja dibawah jam kerja normal (sekitar 17 persen) lebih kecil jika dibandingkan persentase pengangguran terselubung yang ada di pedesaan (29 persen). Dengan kata lain, pekerja yang memiliki jam kerja normal di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan.

## 5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

### 5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 791.494 menjadi Rp 820.426 selama periode 2014-2015. Bila dilihat persentasenya, persentase pengeluaran untuk makanan juga meningkat dari 50,44 persen menjadi 51,96 persen. Begitu juga sebaliknya, persentase pengeluaran untuk non makanan mengalami penurunan dari 49,56 persen menjadi 48,04 persen. Hal ini merupakan indikasi dini adanya penurunan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak signifikan mengalami penurunan. Penurunan persentase pada kelompok bukan makanan hampir merata di semua sub kelompok non makanan kecuali pengeluaran untuk perumahan dan keperluan pesta. Persentase pengeluaran untuk perumahan dan keperluan pesta mengalami kenaikan.



**Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2015**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata perKapita Sebulan					
	Nominal (Rp)			Presentase		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
Makanan	338 466	359 672	383 546	54,31	50,88	50,43
Bukan Makanan	284 719	347 269	377 066	45,69	49,12	49,57
Perumahan	125 537	147 410	193 812	20,14	20,85	25,48
Barang dan Jasa	98 266	126 965	79 950	15,77	17,96	10,51
Pakaian	18 476	24 863	22 542	2,96	3,52	2,96
Barang Tahan Lama	27 464	27 354	55 336	4,41	3,87	7,28
Lainnya	14 977	20 678	25 426	2,40	2,92	3,34
<b>Jumlah</b>	<b>623 185</b>	<b>706 941</b>	<b>760 612</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas

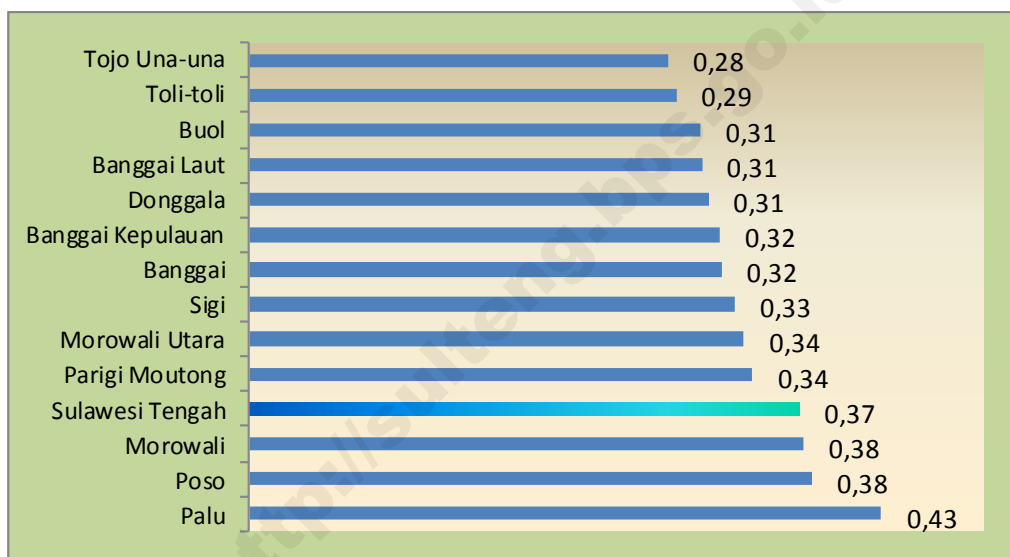
Dengan asumsi bahwa penduduk yang persentase pengeluaran non makanannya lebih besar dari pengeluaran makanan merupakan penduduk yang sejahtera, maka kita dapat mengatakan penduduk Sulawesi Tengah yang sejahtera adalah penduduk yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. Artinya jika dalam 1 rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga, maka penghasilan rumah tangga tersebut minimal Rp 4.000.000 per bulan. Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki masyarakat yang sudah sejahtera barulah Kota Palu.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan, yaitu mendekati pendapatan dengan pengeluaran. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak pendekatan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah indeks gini atau gini ratio.

Indeks gini Sulawesi Tengah Maret 2015 sebesar 0,37 artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Sulawesi Tengah masih dalam tingkat yang sedang. Semakin tinggi indeks gini, maka semakin timpang pendapatan antar penduduk. Penduduk kaya makin kaya, penduduk miskin makin miskin.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, hanya Kabupaten Tolitoli dan Tojo Una-una yang memiliki indeks gini yang bernilai kurang dari 0,30. Pendapatan antar penduduk di Kabupaten Kabupaten Tolitoli dan Tojo Una-una memiliki ketimpangan yang rendah atau relatif merata. Indeks gini tertinggi berada di Kota Palu, yaitu sebesar 0,43. Penduduk yang lebih heterogen diduga menyebabkan indeks gini di Kota Palu menjadi yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Tetapi, indeks gini di Kota Palu masih dalam kategori ketimpangan sedang.

Gambar 5.1. Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2015



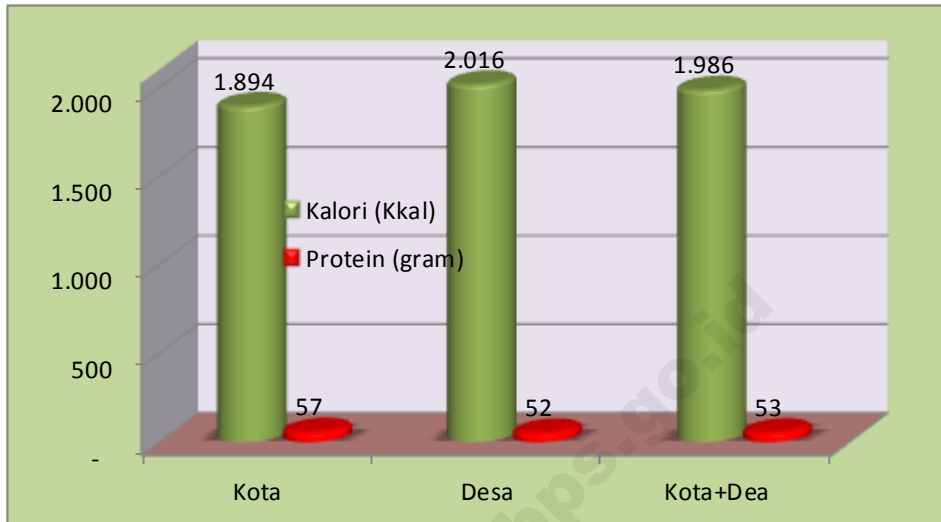
Sumber: Susenas 2015

## 5.2. Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan

dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

**Gambar 5.2. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sulawesi Tengah, 2015**



Sumber: Susenas 2015

Pada tahun 2015 energi yang dikonsumsi penduduk Sulawesi Tengah belum memenuhi angka kecukupan energi yang ditetapkan yaitu 2.100 kkal per hari. Penduduk Sulawesi Tengah baru mengonsumsi kalori sekitar 1.986 kkal per hari. Sedangkan untuk konsumsi protein, penduduk Sulawesi Tengah juga belum mencapai angka kecukupan protein yang ditetapkan, sebesar 57 gram per hari. Penduduk Sulawesi Tengah rata-rata mengonsumsi protein baru sebesar 53 gram per hari. Nampak bahwa konsumsi kalori penduduk perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Namun konsumsi protein penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Konsumsi kalori dan protein penduduk perkotaan masing-masing sebesar 1.894 kkal dan 57 gram per hari. Konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan masing-masing sebesar 2.016 kkal dan 52 gram per hari.

## 6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

### 6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Tabel 6.1 memberi gambaran bahwa terlepas dari kepemilikan, sebagian masyarakat Sulawesi Tengah

tinggal di rumah yang kualitasnya cukup baik, yaitu beratap layak, berdinding permanen dan berlantai bukan tanah.

**Tabel 6.1 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2015**

Indikator	2015
(1)	(2)
Lantai Tanah (persen)	3,81
Atap Layak* (pesen)	87,86
Dinding Permanen (persen)	98,47
Jamban dengan Tangki Septik	58,12
Rata-rata luas lantai perkapita (m <sup>2</sup> )	19,81

Sumber : Susenas

Catatan : \* Tidak beratap dedaunan

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Luas lantai perkapita juga digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah merupakan perumahan yang layak huni atau tidak. MDGs menetapkan standar luas lantai perkapita menjadi salah satu indikator rumah kumuh. Rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> masuk dalam salah satu kriteria rumah kumuh. Kriteria rumah kumuh tidak hanya dilihat dari luas lantai perkapita, oleh sebab itu tidak dapat serta merta menyatakan rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> masuk dalam kategori menempati rumah kumuh. Dengan mengadopsi standar MDGs tersebut, masih terdapat kurang dari 1 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang 7,2 m<sup>2</sup> di Sulawesi Tengah pada tahun 2015. Tabel 6.1 juga memberi gambaran bahwa masyarakat Sulawesi Tengah umumnya menempati luas lantai perkapita yang sudah layak, jauh di atas standar kumuh, rata-rata seorang penduduk menguasai lantai rumah sekitar 20 m<sup>2</sup>.

Jika dilihat per kabupaten/kota, rumahtangga di Kota Palu yang tinggal di rumah yang mempunyai luas paling tinggi. Selain Palu juga Banggai Kepulauan, Morowali, Tolitoli, dan Tojo Una-una memiliki luas lantai perkapita lebih dari 20 m<sup>2</sup>. Hal ini lazim ditemui di Provinsi Sulawesi Tengah karena hubungan kekerabatan yang masih erat, sehingga beberapa anggota rumahtangga yang sudah berkeluarga menempati rumah yang sama dengan keluarga-keluarga lain yang masih memiliki ikatan persaudaraan.

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih

baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2015, masih sekitar 3,81 persen rumahtangga di Sulawesi Tengah yang berlantaikan tanah. Semakin rendah persentase rumahtangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumahtangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Mayoritas masyarakat di Sulawesi Tengah tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa hampir 88 persen rumahtangga tinggal di rumah yang beratap layak dan 98 persen rumahtangga rumahnya berdinding permanen.

## **6.2. Fasilitas Rumah Tinggal**

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumahtangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam bahasan ini, cakupan air bersih yang dimaksud adalah air kemasan, air isi ulang, air ledeng, air pompa, air sumur terlindung dan air yang bersumber dari mata air yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan akhir tinja.

Pada tahun 2015, hampir 82 persen rumahtangga di Sulawesi Tengah dapat mengakses air bersih. Rumah tangga di daerah perkotaan lebih banyak mengkonsumsi air minum bersih dibandingkan dengan rumah tangga pedesaan. Ada dua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang mayoritas penduduknya masih sulit mengakses minum bersih. Hanya kurang dari 75 persen penduduk di Kabupaten Parigi Moutong, Buol, Morowali Utara yang dapat mengakses air minum bersih.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas

tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Sulawesi Tengah, pada tahun 2015 terdapat sekitar 68 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik.

**Tabel 6.2. Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2015**

Kabupaten/ Kota	Air Dalam Kemasan + Leding	Pompa /Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tidak Terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Banggai Kepulauan	30,58	2,72	3,57	52,59	6,25	4,29
02. Banggai	31,36	41,77	7,17	14,37	3,39	1,94
03. Morowali	29,97	23,25	5,15	28,53	1,08	12,02
04. Poso	30,81	13,70	0,55	41,54	1,74	11,66
05. Donggala	15,00	40,31	2,22	26,94	4,14	11,39
06. Tolitoli	40,36	13,46	1,85	28,70	1,11	14,52
07. Buol	29,97	21,01	17,93	21,23	3,36	6,50
08. Parigi Moutong	16,25	45,75	7,18	12,41	7,67	10,74
09. Tojo Una-una	32,37	13,98	2,11	35,00	3,72	12,82
10. Sigi	5,39	41,45	1,08	31,83	7,35	12,90
11. Banggai Laut	22,68	0,68	9,48	67,16	0,00	0,00
12. Morowali Utara	20,27	26,81	12,95	23,64	9,42	6,91
71. Kota Palu	66,30	23,55	0,00	8,75	0,23	1,17
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>28,56</b>	<b>23,73</b>	<b>5,48</b>	<b>30,21</b>	<b>3,80</b>	<b>8,22</b>

Sumber : Susenas 2015

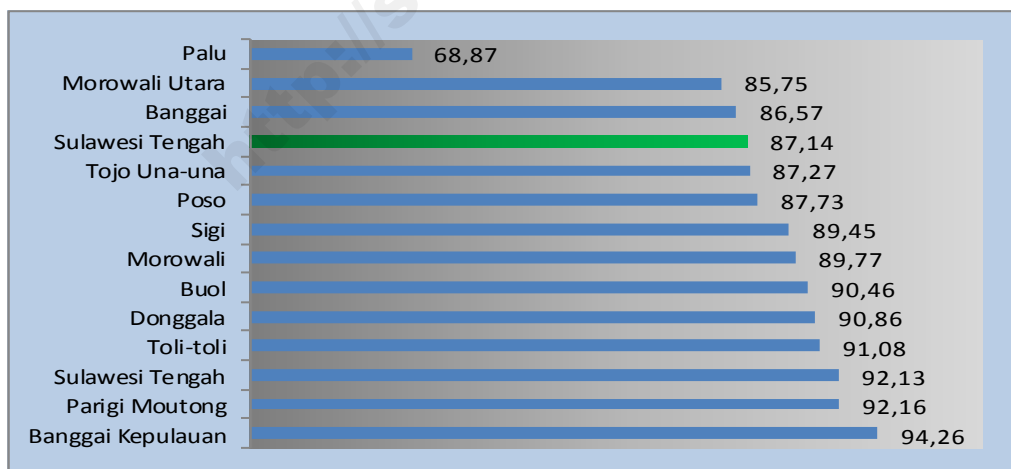
Nampak juga di perkotaan lebih banyak rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dan tangki septik dibandingkan di pedesaan. Rumah tangga di pedesaan kemungkinan masih kental rasa persaudaraannya sehingga masih ada rumah tangga yang menumpang ke jamban tetangga. Kemungkinan lain adalah di daerah pelosok, masih ada jamban umum yang dapat digunakan bersama-sama dalam satu lingkungan/jaga/lindungan atau bahkan satu desa.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil susenas 2015, sembilan puluh dua persen rumah tangga di Sulawesi Tengah sudah menikmati fasilitas listrik. Tidak tampak secara signifikan perbedaan rumah tangga perkotaan dan pedesaan, artinya distribusi listrik di Sulawesi Tengah sudah hampir merata. Dari sudut pandang Kabupaten/Kota, masih ada 15 persen rumah tangga di Kabupaten Donggala yang belum mengkonsumsi listrik.

### 6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Gambar 6.1. Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota (persen), 2015**



Sumber: Susenas 2015

Sekitar 92 persen rumah tangga di Sulawesi Tengah menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bebas sewa, dan lainnya. Dari gambar terlihat bahwa rumah tangga di Kota Palu yang menempati



rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya (68,87 persen). Diduga penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Palu dibandingkan kab/kota lainnya. Kurang dari 22 persen penduduk di Kota Palu menempati rumah kontrak/sewa, sedangkan di Buol, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong dan Banggai Kepulauan lebih dari 90 persen atau hanya 10 dari 100 orang tinggal/menempati bukan rumah milik sendiri.

Penduduk perdesaan lebih banyak menempati rumah milik sendiri dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Untuk membangun rumah. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Sehingga penduduk yang belum memiliki rumah lebih memutuskan untuk menempati rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa.

<http://sulteng.bps.go.id>

## 7. KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

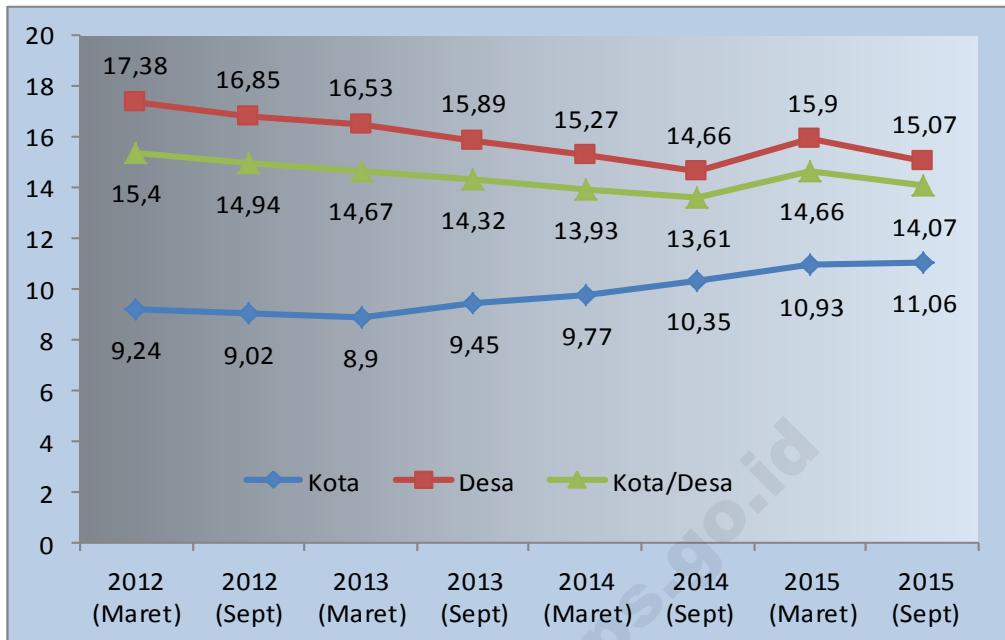
Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh gap atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Tentunya, semakin kecil indikator-indikator tersebut menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

### 7.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

**Gambar 7.1. Persentase Penduduk Miskin, 2012 - 2015**



Sumber: Susenas 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah masih berada di atas angka nasional. Artinya, Sulawesi Tengah menyumbang bertambahnya angka kemiskinan. Tentunya hal itu mengindikasikan perlunya usaha lebih giat pemerintah Sulawesi Tengah di masa mendatang. Ada hal yang menarik dari perkembangan/tren kemiskinan Sulawesi Tengah selama 4 tahun terakhir. Tren kemiskinan cenderung menurun, dari 15,4 persen pada Maret 2012 menjadi 13,62 persen pada September 2014, dan meningkat menjadi 14,66 persen, namun kembali menurun menjadi 14,07 persen pada September 2015.

Bila diperhatikan menurut daerah, persentase penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di kota. Namun demikian terlihat tren kemiskinan di daerah pedesaan terjadi penurunan walaupun di tahun 2015 terjadi sedikit peningkatan, hal yang sama juga terjadi di perkotaan.

Pada September tahun 2015, penduduk miskin Sulawesi Tengah banyak yang terkonsentrasi di pedesaan, yang mencapai mencapai 15,07 persen, sementara di perkotaan hanya 11,06 persen. Rendahnya angka kemiskinan di perkotaan merupakan pencapaian yang cukup baik, karena menurunkan angka kemiskinan membutuhkan upaya yang keras dari berbagai pihak.

## 7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Membahas kemiskinan tidak hanya sekedar mengenai persentase penduduk miskin (P0). Tetapi ada variabel lain yang berkaitan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

**Tabel 7.1. Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Tengah, 2014 - 2015**

Variabel Kemiskinan	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</u>			
September 2014	2,18	2,09	2,11
Maret 2015	1,7	2,76	2,52
September 2015	1,41	2,69	2,37
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</u>			
September 2014	0,65	0,52	0,55
Maret 2015	0,43	0,74	0,66
September 2015	0,32	0,69	0,60
<u>Garis Kemiskinan</u>			
September 2014	349.978	321.009	328.063
Maret 2015	358.399	331.855	338.443
September 2015	376.496	353.080	358.892

Sumber: Susenas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu, selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selama periode 2014-2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan, juga Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Pergerakan Indeks kedalaman kemiskinan meningkat, hal itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 2,11 di September 2014 menjadi 2,37 di September 2015. Indeks Keparahannya Kemiskinan yang meningkat mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,55 di September 2014 menjadi 0,60 di September 2015.

Indeks kedalaman daerah perkotaan (1,41) lebih kecil dibandingkan pedesaan (2,69), artinya penduduk miskin di pedesaan memiliki gap yang lebih besar dengan garis kemiskinan. Gap yang lebih besar tersebut menyebabkan membutuhkan usaha yang lebih juga untuk memperkecil gap tersebut. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahannya kemiskinan di perkotaan juga lebih kecil dibandingkan dengan angka pedesaan. Di pedesaan, pendapatan penduduk miskin lebih bervariasi. Indeks keparahannya kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,32, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 0,69.

## 8. SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

### 8.1. Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin, tujuan utama bepergiannya adalah berlibur/rekreasi.

**Tabel 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	17,30	14,43	15,88
Banggai	15,95	17,93	16,92
Morowali	14,81	11,41	13,15
Poso	17,01	18,84	17,89
Donggala	12,80	15,75	14,23
Toli-toli	12,49	15,24	13,84
Buol	12,29	6,58	9,51
Parigi Moutong	16,68	16,36	16,52
Tojo Una-una	15,95	14,78	15,38
Sigi	4,94	5,02	4,98
Banggai Laut	21,58	17,53	19,57
Morowali Utara	9,42	10,51	9,94
Kota Palu	23,80	24,75	24,27
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>15,34</b>	<b>15,73</b>	<b>15,53</b>

Sumber : Susenas 2015

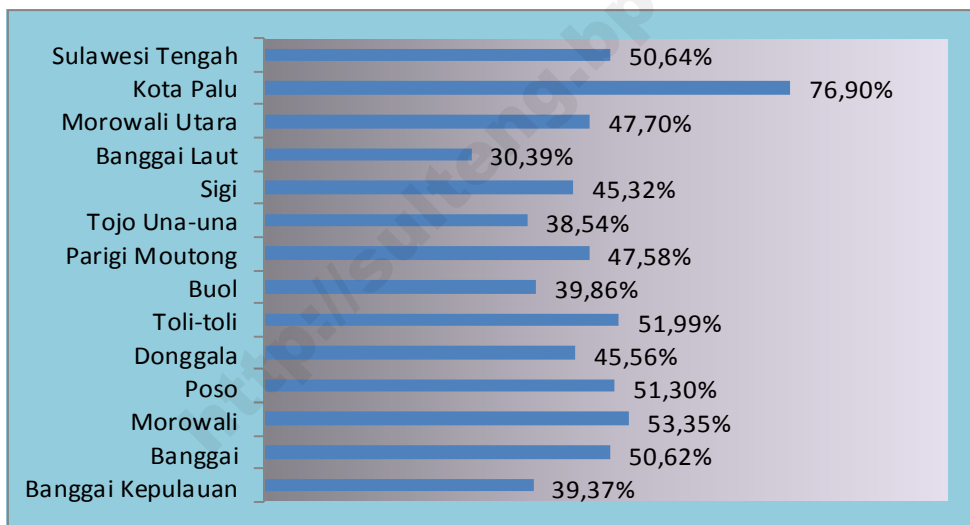
Persentase penduduk Sulawesi Tengah yang bepergian wisata pada tahun 2015 sebesar 15,53 persen. Jika dibandingkan antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa preferensi laki-laki dalam hal bepergian/berwisata tidak berbeda dengan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama di kisaran 15 persen saja yang suka bepergian maupun berwisata. Perbedaan yang cukup mencolok dibanding kabupaten/kota lainnya adalah antara laki-laki dan perempuan di Banggai, Poso, Donggala, Tolitoli, Morowali Utara dan Palu lebih banyak perempuan yang suka bepergian atau berwisata dibanding laki-laki. Di Buol laki-laki jauh lebih banyak melakukan perjalanan wisata yaitu 12,29 persen sedangkan perempuan hanya 6,58 persen. Penduduk yang paling kurang melakukan perjalanan wisata adalah Sigi, dimana hanya 4,98 persen dibanding dengan Palu yang mencapai 24,27 persen.

## 8.2. Akses pada Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan HP/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Di daerah perkotaan, penduduk Sulawesi Tengah lebih banyak yang menguasai/memiliki HP dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Sekitar 51 persen penduduk Sulawesi Tengah menguasai/memiliki HP. Jika dilihat dari sisi gender, hanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait kepemilikan HP.

**Gambar 8.1. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP (persen), 2015**



Sumber: Susenas 2015

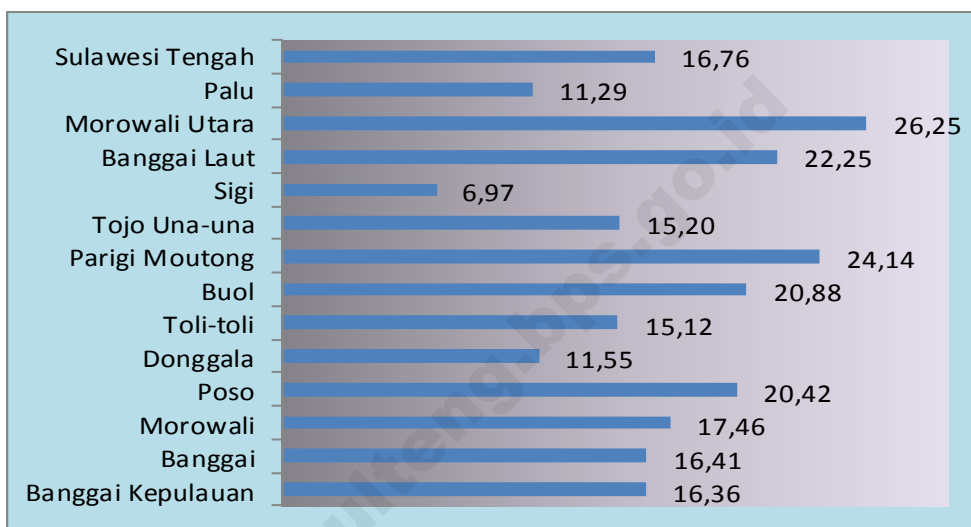
Dilihat dari kabupaten/kota, Kota Palu merupakan wilayah di Sulawesi Tengah yang persentase penduduk pengguna HP paling besar. Sekitar 77 persen penduduk Palu memiliki/menguasai HP, sementara di Banggai Laut kurang lebih 31 persen penduduknya menguasai/memiliki HP. Selain kepemilikan HP, akses terhadap internet juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Susenas 2015 memberi gambaran bahwa 18 hingga 19 dari 100 penduduk 5 tahun ke atas Sulawesi Tengah mengakses internet.



### 8.3. Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

**Gambar 8.2. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2015**



Sumber: Susenas 2015

Kredit Usaha yang dimaksud dapat berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi). Variasi rumah tangga penerima kredit antar wilayah sangat tinggi. Dari 16,76 persen rumah tangga penerima kredit tersebut, di Morowali Utara paling banyak yaitu mencapai 26,25 persen. Sedangkan rumah tangga penerima kredit terkecil adalah di Sigi. Rendahnya rumah tangga yang memanfaatkan fasilitas kredit merupakan tantangan bagi penyelenggara perkreditan.

#### 8.4. Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut data Susenas 2015, ada sekitar 1,29 persen penduduk Sulawesi Tengah yang menjadi korban kejahatan selama September 2014 sampai dengan Februari 2015. Wilayah Kota Palu paling banyak mayarakatnya menjadi korban kejahatan yaitu mencapai 2,5 persen, artinya ada 2 sampai 3 dari 100 orang menjadi korban kejahatan. Daerah yang relatif aman adalah di Morowali Utara, dimana yang menjadi korban kejahatan hanya 0,35 persen, artinya bahwa hanya ada 1 dari 300 orang menjadi korban kejahatan. Menarik jika diperhatikan yang menjadi korban kejahatan, terkecuali di Tolitoli, sigi dan Morowali Utara, yang menjadi korban kejahatan relatif lebih banyak dialami oleh laki-laki. Masih cukup tingginya masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat dijadikan evaluasi bagi masyarakat itu sendiri, terlebih oleh aparat kepolisian.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 48 Palu 94114  
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612  
website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: [bps7200@bps.go.id](mailto:bps7200@bps.go.id)

ISBN 978-6-02-1385-37-1



9 786021 385371